

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmosudirjo, S. Prayudi. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Budiharjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Edisi Revisi.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

H. Muh. Jufri Dewa, 2011. *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari: Unhalu Press.

Heru Purnomo. 2015. *Kompilasi Putusan Pengujian Undang Undang oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.

Jum Anggraini. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.

Marbun, S.F. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press.

Muhamad Azhar. 2019. *Buku Ajar Hukum Pertambangan*. Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro.

Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia.

Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Ketiga. Surabaya: Airlangga University Press.

Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Safri Nugraha. *et. al.* 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim H.S, 2012. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto Sunarno Muchsan. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmarang, Victor M. dan Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarwan, Danim. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sunarno, Siswanto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman, Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Tri Hayati. 2012. *Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah, Studi pada Pertambangan Timah di Pulau Bangka*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- , 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tambang dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas Alam;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber

- Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 74);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 78); dan
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 18).

KARYA ILMIAH, JURNAL, DAN LAIN LAIN

- Adiyanta, F.C. Susila. 2019. *Pembaruan Hukum Nasional: Pruralisme, Unifikasi Hukum, dan Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019.
- Adiyanta, F.C. Susila. 2019. *Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, November 2019.
- Amalia Diamantina. 2010. *Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien*. MMH Jilid 39 No. 1 Maret 2010.

- Dedis Elvalina. 2016. *Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2. Oktober 2016.
- Herma Yanti. 2017. *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*. Jurnal Lex Specialis 2017.
- Pandjaitan, Hince. Tidak ada tahun. *Artikel Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa yang dimuat dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*.
- Iskrok. Tidak ada tahun. *Wewenang DPRD Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan Dengan Pemilihan Langsung*, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya Malang.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2009. *Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional dalam Mewujudkan Good Governance*. Majalah Hukum Varia Peradilan. Edisi April 2009.
- Kadek Cahya Susila Wibawa. 2019. *Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 1 March 2019.

- Kartowiyono, Kartono. 2017. *Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014*. Bina Hukum Lingkungan Volume 2, Nomor 1 2017.
- Kuyek, Joan. 2005. *Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*. Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit. July 28 2005.
- Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian. 2017. *Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Unifikasi, Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017.
- Muhammad Azhar. 2018. *The New Renewable Energy Consumption Policy of Rare Earth Metals to Build Indonesia's National Energy Security*, E 3S Web of Conferences, Vol. 68, 2018, The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental Issues 2018 (1st SRICOENV 2018).
- Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono. 2016. *Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 01-Maret 2016: 19–32.
- Nanik Trihastuti. 2014. *Tanah Tambang dan Masyarakat Hukum Adat*. Idepth Publishing. Bandar Lampung 2014.
- Oheo K. Haris. 2015. *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan*. Yuridika Volume 30 No 1 Januari 2015.

- Puluhulawa, Fenty. 2010. *Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan*. Jurnal Pelangi Ilmu. Volume 3 Nomor 4, 4 September 2010.
- , 2011. *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011.
- Reghi Perdana. 2016. *Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Februari 2016.
- Rian Denny Setiawan. 2014. *Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Terhadap Pertambangan Mineral Non Logam di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012*. Jom FISIP Universitas Riau Volume 1 No. 2. Oktober 2014.
- Rizki Setiawan. 2018. *Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Kewenangan Tata Kelola Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral Oleh Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jurnal Kajian Pemerintahan Volume IV Nomor 1 Maret 2018.
- Siti Nur Solechah. 2012. *Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan*, Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IV, Nomor 12/II/P3DI/Juni/2012.
- Septina Ayu Handayani. 2015. *Pengawasan Penerapan Good Mining Practices pada Pertambangan Batuan Andesit CV. Selo Putro Wonogiri Pra dan*

Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.

Tri Hayati. 2019. *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-49 No.3 Juli-September 2019.

Usman, Dudi Nasrudin, dkk. 2017. *Good Mining Practice Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.* Ethos Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol 5, No.1, Januari 2017.

INTERNET

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2004.

Malik. *Perspektif Fungsi Pengawas Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.* Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang 2007.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2013. *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan kepada Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup.* available at:
https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_lingkungan_hidup.pdf.
 Date accessed: 5 Januari 2020.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2015. *Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam.* available at:

https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf.

Date accessed: 21 Desember 2019.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, *Tupoksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah*. available at: <https://esdm.jatengprov.go.id/download/TUPOKSI-DINAS-ENERGI-DAN-SUMBER-DAYA-MINERAL-PROVINSI-JAWA-TENGAH.pdf>.

Date accessed: 23 Desember 2019.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Bab II Gambaran Umum Pelayanan OPD Rancangan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023*. available at: [https://esdm.jatengprov.go.id/download/materi/Rancangan Strategis/Bab-II-Gambaran-Umum-Pelayanan-OPD.pdf](https://esdm.jatengprov.go.id/download/materi/Rancangan_Strategis/Bab-II-Gambaran-Umum-Pelayanan-OPD.pdf). Date accessed: 10 Maret 2020.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Bab III Isu-Isu Strategis Rancangan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023*. available at: [https://esdm.jatengprov.go.id/download/materi/Rancangan Strategis/Bab-III-ISU-ISU-STRATEGIS.pdf](https://esdm.jatengprov.go.id/download/materi/Rancangan_Strategis/Bab-III-ISU-ISU-STRATEGIS.pdf). Date accessed: 10 Maret 2020.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Paparan Rancangan Awal Rancangan Strategis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023*. available at: [https://esdm.jatengprov.go.id/download/materi/Rancangan Strategis/Paparan-Ranwal-Rancangan Strategis-ESDM.pdf](https://esdm.jatengprov.go.id/download/materi/Rancangan_Strategis/Paparan-Ranwal-Rancangan_Strategis-ESDM.pdf). Date accessed: 10 Maret 2020 .

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ESDM Jateng Tahun 2016*. available at: <https://ppid.esdm.jatengprov.go.id/dokumen/kegiatan-kinerja/LKjIP-2016.pdf>. Date accessed: 10 Maret 2020.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ESDM Jateng Tahun 2017*. available at: <https://ppid.esdm.jatengprov.go.id/dokumen/kegiatan-kinerja/LKjIP-2017.pdf>. Date accessed: 10 Maret 2020.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ESDM Jateng Tahun 2018*. available at: <https://ppid.esdm.jatengprov.go.id/dokumen/kegiatan-kinerja/LKjIP-2018.pdf>. Date accessed: 10 Maret 2020.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Lembar Evaluasi IUP Eksplorasi*. available at: http://esdm.jatengprov.go.id/download/perizinan/1_cek-list-iup-eksplorasi.pdf. Date accessed: 10 Maret 2020.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Lembar Evaluasi IUP Operasi Produksi*. available at: Sumber: http://esdm.jatengprov.go.id/download/perizinan/1_cek-list-iup-operasi-produksi.pdf. Date accessed: 10 Maret 2020.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Lembar Evaluasi IUP Eksplorasi*. available at:

http://esdm.jatengprov.go.id/download/perizinan/1_cek-list-wiup.pdf. Date accessed: 10 Maret 2020.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. *IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan*. available at: http://perizinan.jatengprov.go.id/frontend/bidang_perizinan?idlicense=281. Date accessed: 10 Maret 2020.

Extractive Industries Transparency Initiative. *Data Ekonografik 2016*. available at: eiti.ekon.go.id. Date accessed: 12 Oktober 2019.

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. *Jenis-Jenis Pengawasan*. available at: <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>. Date accessed: 19 Februari 2020.

Kementrian Hukum dan HAM. *Kewenangan Kepala Daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah*. available at: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2943-kewenangan-kepala-daerah-terhadap-badan-usaha-milik-daerah.html>. date accessed: 5 Januari 2020

Republika Online. *Gubernur Kuasai Izin Pertambangan*. available at: <http://www.republika.co.id/berita/koran/nusantara-koran/14/09/23/ncc8k97-gubernur-kuasai-izin-pertambangan>. Date accessed: 5 February 2020.